



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL  
UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI  
MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsi sosial di bidang kemanusiaan, sumbangan dari masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat kepada Palang Merah Indonesia;  
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pengumpulan sumbangan dalam wilayah Kabupaten harus mendapat izin dari Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);  
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Memberikan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026.
- KEDUA : Hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan digunakan untuk membiayai kegiatan PMI Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 sampai dengan 31 Mei 2026, dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Pedoman penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia Tahun 2026 adalah :
  - a. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pengumpulan sumbangan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat antara lain:
    1. tidak diperbolehkan dilakukan di jalan-jalan/tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum atau ketenteraman masyarakat; dan
    2. dilakukan secara sukarela, tidak boleh memaksa baik langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Ketentuan penggunaan dana hasil pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagai berikut :
  - a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk biaya kegiatan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul;
  - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk biaya administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan; dan
  - c. penggunaan hasil bulan dana PMI sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua PMI Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Menugaskan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan sumbangan dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETUJUH : Ketentuan sasaran dan besarnya sumbangan Bulan Dana PMI Kabupaten Bantul Tahun 2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu izin pengumpulan sumbangan, Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul harus memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Bantul mengenai hasil pengumpulan sumbangan.
- KESEMBILAN : Dalam hal pelaksanaan Bulan Dana PMI tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 23 Januari 2026

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bantul
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
4. Kepala Insetansi Vertikal se-Kabupaten Bantul;
5. Kepala BUMN/BUMD se-Kabupaten Bantul;
6. Panewu se-Kabupaten Bantul;
7. Lurah se Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG

MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL

UNTUK MENYELENGGARAKAN

PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI

MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA

PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA BULAN DANA PMI TAHUN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul	
2.	Penasehat	2. Wakil Bupati Bantul	
3.	Penanggung Jawab	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	
4.	Ketua	Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	
6.	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	
7.	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
8.	Wakil Ketua IV	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
9.	Wakil Ketua V	Kepala Kantor Samsat Kabupaten Bantul	
10.	Wakil Ketua VI	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
		Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bantul	

1	2	3	4
11.	Sekretaris I	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Sugeng Murjoko, S.IP
12.	Sekretaris II	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Budianta, A.Md.
13.	Sekretaris III	Unsur Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	M. Fajar Taufiq
13.	Bendahara I	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Triyanto, S.STP, M.Eng
15.	Bendahara II	Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Riswanto, AMd
16.	Bendahara III	Unsur Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	Nur Yuni Lestari
17.	Pengawas I	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik Hukum dan Pemerintahan 3. Pengurus PMI Kab. Bantul	Ir. Pulung Haryadi, M.S.c
18.	Pengawas II	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan 3. Pengurus PMI Kab. Bantul	
19.	Pengawas III	1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan 3. Pengurus PMI Kab. Bantul	
			. Suparman, SIP., MHum
			dr. Agus Triwidnyantara, MMR

1	2	3	4
20.	Seksi-Seksi a. Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>3. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>4. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>6. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>7. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>8. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>9. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>11. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> <li>12. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang ditunjuk</li> </ol>	

1	2	3	4
		<p>13. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>14. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>15. Unsur Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>16. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>17. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>18. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>19. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja yang ditunjuk.</p> <p>20. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</p> <p>21. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>22. Unsur Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>23. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>24. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p>	

1	2	3	4
		<p>25. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</p> <p>26. Unsur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>27. Unsur RSUD Saras Adyatma Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>28. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>29. Unsur Kapanewon se-Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>30. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul di yang ditunjuk</p> <p>31. Unsur Rumah Tahanan Kelas II Bantul yang ditunjuk</p> <p>32. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>33. Unsur Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>34. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>35. Unsur Kantor Samsat Kabupaten Bantul yang ditunjuk</p> <p>36. Unsur Satlantas Polres Bantul yang ditunjuk</p> <p>37. Unsur KPP Pratama Kab. Bantul yang ditunjuk</p> <p>38. Pengurus PMI Kapanewon</p> <p>39. Unsur Pengurus PMI Kab. Bantul</p>	<p>1. Reni Mariastuti, SH.M.Hum.</p> <p>2. Nurul Budi Santosa, S.Kep.ners</p>



1	2	3	4
	b. Publikasi	1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang ditunjuk 2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setda. Kab Bantul yang ditunjuk 3. Unsur Pengurus PMI Kabupaten Bantul	
21.	Pembantu Umum	Unsur Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul	1. Waljito, SH 2. Gandung Jadmiko 1. Kepala Markas PMI dan Staff. 2. Relawan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PALANG  
 MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL  
 UNTUK MENYELENGGARAKAN  
 PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI  
 MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA  
 PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2026

SASARAN DAN BESARNYA SUMBANGAN DANA PMI TAHUN 2026

No	SASARAN	BESARNYA (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Bupati, Wakil Bupati, dan Anggota DPRD	100.000	Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota, dipotong satu kali.
2.	Masyarakat Keluarga Sejahtera II dan III plus (tidak termasuk PNS, TNI, POLRI, BUMN, BUMD)	2.000	Unsur Kapanewon setempat	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
3.	ASN, Anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/Bank, dan Pegawai BUMD, Non ASN <div>                         a. Golongan I                         b. Golongan II                         c. Golongan III                         d. Golongan IV                         e. Pejabat Eselon IV                         f. Pejabat Eselon III                         g. Pejabat Eselon II                         h. PPPK Kelas V                         i. PPPK Kelas VII                         j. PPPK Kelas IX                         k. Non ASN dan Tenaga Kontrak                     </div>	<div>                         7.500                         10.000                         20.000                         25.000                         40.000                         50.000                         75.000                         7.500                         10.000                         20.000                         5.000                     </div>	Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Instansi/unit kerja/BUMN/ BUMD yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai dipotong satu kali.

1	2	3	4	5
4.	Pamong Kalurahan a. Lurah b. Carik c. Kaur/Kasi/Dukuh/Staf Kalurahan/Staf Honorer Kalurahan	15.000 10.000 7.000	Unsur Kapanewon setempat	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota dipotong satu kali.
5.	Pelajar a. PAUD b. SD/MI c. SMP/Mts d. SMA/SMK/MA e. Mahasiswa	Sukarela Sukarela Sukarela Sukarela	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bantul 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul 3. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti stiker.
6.	Pemilik Kendaraan Bermotor a. Roda 2 (dua) b. Roda 4 (empat) c. Diatas Roda 4 (empat)	3.000 3.000 3.000	1. Kepala KPPD DIY (Samsat) Kabupaten Bantul 2. Kepala Satlantas Polres Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
7.	Trayek/Uji Kendaraan	5.000	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti stiker.
8.	Pengunjung Wisata	2.000	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.

1	2	3	4	5
9.	1. Pemohon Akta : a. Kelahiran b. Perkawinan c. Perceraian 2. Legalisasi Akta	2.000 5.000 5.000 2.000	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
10.	Pengusaha/Toko/Swalayan	Sukarela	Unsur Kapanewon Setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
11.	Apotek/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/Rumah Sakit.	Sukarela	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
12.	Dokter/Bidan Praktek a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi d. Bidan e. Perawat	20.000 35.000 15.000 7.000 5.000	Unsur Kapanewon setempat	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
13.	Dokter/Bidan/Perawat/ Karyawan Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan setara dengan ASN a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV	7.500 10.000 20.000 25.000	Direktur Rumah Sakit Swasta/Balai Pengobatan yang bersangkutan	Dibuat daftar sesuai keadaan anggota/pegawai dan dipotong satu kali.
14.	Pegawai Bank Swasta dan BPR	Sukarela	Kepala Bank masing-masing	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
15.	Nikah KUA	Sukarela	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti kwitansi.
16.	Talak/Rujuk/Cerai di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri	2.000	Ketua PA Kabupaten Bantul dan Ketua PN Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.

1	2	3	4	5
17.	Yang mendapat pelayanan di Kantor Pertanahan Kab. Bantul	2.000	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
18.	Pedagang Pasar	2.000	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
19.	Penerima pelayanan perizinan di DPMPTSP Kab. Bantul	2.000	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
20.	Pencari SIM dan SKCK	3.000	Kepala Kepolisian Resor Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.
21.	Penerima Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama	5.000	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kab. Bantul	Penyumbang diberi tanda bukti karcis.

BUPATI BANTUL,

ttd  
 ABDUL HALIM MUSLIH